

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL

Mochamad Syawie

ABSTRAK

Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan. Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan. Substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah social. Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan dan kesenjangan sosial

ABSTRACT

Levels of poverty are no longer just a problem of lack of food, but certain has even reached the extreme out stage and the absence of food for people consumption. Portraits of poverty become very contrasting because most citizens live in abundance, while others deprived of life. Wealth for some people means poverty for others. Level of inequality is very extraordinary and dangerous for peoples. The substance of the gap is inequity in access to economic resources. Problem of inequality is a matter of justice, which deals with many social problems. Problem of inequality has a strong correlation to poverty.

Key words: Poverty, Inequality, Social Problem, and Social Justice.

I. PENDAHULUAN

Menarik untuk disimak apa yang ditulis dalam Tajuk Rencana Kompas (18/10/2011) tentang jeritan kemiskinan. Alangkah tragisnya dampak kemiskinan karena telah membawa kematian, seperti terlihat pada beberapa kasus bunuh diri belakangan ini.

Fenomena kemiskinan memang sangatlah kasatmata sebagai realitas berlapis-lapis

yang terus menjerit-jerit, *crying poverty*. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan. Tidak sedikit orang terkapar karena tidak tahan menderita kelaparan dan kekurangan gizi yang membuka jalan lebih cepat ke arah kematian dini. Inilah proses kematian secara pelan-pelan tetapi kejam.

Dikatakan oleh pemikir Martin Heidegger (2011) waktu tidak lain dirasakan sebagai perjalanan menuju maut, *Zeit zum Tode*.

Tidak sedikit orang gagal mengelola rasa lapar dan kemiskinan. Kekalutan hidup itu menghancurkan harapan, merasa diri kalah dan tidak berdaya, serta *fatalistic*, yang pada orang tertentu tergiring menempuh jalan pintas dengan bunuh diri sebagai upaya membebaskan diri dari situasi tertekan. Tindakan bunuh diri dianggap, liberatif. Tidak semua tindakan bunuh diri karena persoalan ekonomi, tetapi bisa saja karena faktor lain. Namun, kasus bunuh diri karena alasan ekonomi termasuk sangat tragis karena memperlihatkan pudarnya rasa kemanusiaan dan kepedulian. Jatunya korban karena kemiskinan sekaligus memperlihatkan kemiskinan lain, yaitu kemiskinan nurani kolektif bangsa dan lemahnya kepedulian. Para pemimpin juga kehilangan sensitivitas atas nasib rakyat yang bergulat dengan kemiskinan. Sebagian uang bagi program perbaikan nasib warga miskin dicuri dalam praktik korupsi yang semakin kompleks dan merebak luas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kemiskinan nurani sedang menghinggapi kaum elit bangsa (2011).

Dampak kemiskinan nurani ini sangatlah luar biasa sebagai kejahatan dengan membiarkan sebagian warga masyarakat menderita dan bergulat dengan kesulitan hidup. Persoalan kemiskinan itu terasa semakin dramatis karena berlangsung di negeri yang digambarkan sangat kaya sumber daya alam. Masih ada sebagian warga masyarakat untuk dapat makan sekali sehari saja sulit.

Kasus enam anak pasangan Jamhamid (45) dan Siti Sunayah (41), warga Jepara, Jateng, tewas setelah sarapan tiwul pada

Jum'at (31/12/2010) pagi. Anak-anak mereka meninggal pada Sabtu dan Minggu. Karena pendapatan kepala keluarga yang bekerja di Semarang itu tak cukup untuk membeli beras, keluarga tersebut makan tiwul, bahan makanan dari parutan ketela pohon sebagai pengganti nasi (Rohman; 2011). Juga terhadap ketakacuhan kita pada kemiskinan yang memangsa berjuta-juta rakyat di pelosok negeri yang busung lapar, kurang gizi, menderita penyakit mengerikan tanpa pernah dibawa ke rumah sakit karena tiada biaya, putus sekolah, dan ternista di ruang-ruang pengadilan karena lemahnya posisi mereka di depan para pejabat dan pemilik uang yang khianat: di Nusantara gemah ripa loh jinawi ini (Kurnia JR; 2011).

Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan.

Karena itu, ketika kebangkitan nasionalisme tidak bisa meningkatkan taraf hidup berperadaban, nasionalisme dapat meredup dan luruh dengan sendirinya sebagaimana yang kita alami dewasa ini. Kemiskinan struktural dan kultural yang permanen dalam kehidupan membuat karakter bangsa ini makin terpuruk. Akibatnya, bangsa ini kehilangan jati diri, yang membuatnya makin sulit membangkitkan kembali semangat nasionalismenya (Musa Asy'arie, 2011)

II. KESENJANGAN SOSIAL

Perekonomian Indonesia tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai

produk domestik bruto naik dari Rp. 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi Rp. 6.422,9 triliun tahun lalu. Namun, pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat (Kompas, 8/2/2011).

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky (2011), mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga mereka. Sementara sektor industri berorientasi penciptaan nilai tambah penyerap lapangan kerja, yang menjadi salah satu indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi, justru kian melemah.

Dalam perspektif ekonomi politik, ketimpangan pembangunan antarsektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan. Dukungan kebijakan terhadap pembangunan sektor industri tanpa menyertakan sektor pertanian di masa lampau telah menciptakan banyak kantong-kantong orang miskin (Yustika, 2009). Sayangnya, pengembangan sektor industri secara besar-besaran yang digerakkan oleh pemerintah justru mengalami kegagalan, padahal kebijakan khusus telah diberikan, misalnya subsidi, tata niaga, lisensi dan monopoli. Sebaliknya, akibat kebijakan khusus tersebut, sektor industri yang dikembangkan struktur pasarnya menjadi sangat terkonsentrasi.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengumumkan, bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2010 dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Rp. 6.422,9 triliun dan pendapatan per kapita mencapai Rp. 27 juta per tahun (Kompas, 8/2/2011). Jumlah ini didapat dari membagi Rp. 6.422,9 triliun dengan 237,6 juta penduduk Indonesia. Rusman menjelaskan, konsumsi rumah tangga menyumbang kue pertumbuhan

terbesar, yakni 56,7 persen, disusul investasi 32,2 persen. Idealnya, konsumsi rumah tangga terus menurun hingga di bawah 50 persen, seperti yang terjadi di Negara-negara maju.

Menurut Yanuar, konsumsi rumah tangga yang tinggi tersebut sebagian besar didukung oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Konsumsi nasional pun ternyata gagal mendorong kegiatan produksi karena sebagian besar kebutuhan domestik didapat dari impor.

Mengutip laporan *Asia Wealth Report 2010* yang memaparkan secara rinci ke mana saja distribusi investasi kekayaan orang-orang kaya di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Kelompok orang kaya Indonesia menyimpan 33 persen asset kekayaan mereka dalam bentuk deposito atau tabungan, *real estate* (22 persen), saham (19 persen), reksa dana pendapatan tetap (16 persen), dan investasi alternatif, seperti kurs mata uang asing atau komoditas (10 persen).

“Jadi, kebanyakan peningkatan pendapatan ini berasal dari deposito dan instrumen finansial lain dan yang menikmati hanya 200.000 pemilik rekening di atas Rp. 100 juta, menurut data BPS (Kompas, 8/2/2011). Bagaimana bisa berkualitas kalau pertumbuhan lebih rendah dari Inflasi (6,96 persen) dan orang yang tumbuh saat ini hanya pemilik modal yang mampu bermain pasar uang, bukan berproduksi,” ujar Yanuar.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat menuju 2013 dengan system ekonomi terbuka sama sekali bukan jaminan bahwa kesenjangan kaya-miskin di Indonesia akan berkurang banyak. AS saja, sebagai Negara dengan ekonomi terbesar di dunia, mengalami problem dalam

kesenjangan kaya-miskin itu (Sayidiman Suryohadiprojo, 2011). Di harian *The New York Time* edisi 2 Januari 2011 ada tulisan Nicholas D Kristof, “*Equality, a True Soul Food*”. Tulisan itu berhubungan dengan kondisi masyarakat AS dewasa ini yang menurut *Economic Policy Institute* di Washington DC, sekarang mengalami pembagian kekayaan sangat tak wajar.

Menurut lembaga itu, satu persen penduduk AS terkaya menguasai 34 persen aset nasional, sedangkan 90 persen penduduk termiskin menguasai 29 persen. Itu berarti, antara sekitar 2 juta orang terkaya dan 150 juta termiskin ada senjang amat lebar. Jika dihubungkan dengan tulisan Richard Wilkinson dan Kate Pickett, dalam bukunya *The Spirit Level: Why greater Equality Makes Societies Stronger*, sebagaimana dikutip Sayidiman Suryohadiprojo (2011), mereka mengatakan bahwa kesenjangan yang lebar mengakibatkan berbagai kelemahan masyarakat, seperti kriminalitas tinggi, penggunaan narkoba meningkat, bahkan tingkat tinggi dalam penyakit jantung dan kanker.

Kesenjangan yang lebar tak hanya berakibat pada ekonomi, tetapi juga amat besar dampaknya terhadap kondisi psikologi bangsa. Maka boleh dikatakan bahwa “kesenjangan adalah kerawanan yang besar”. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Indonesia. Substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah sosial (Oman Sukmana, 2005). Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Reaksi lain terhadap meruyaknya ketimpangan-ketimpangan dalam pembagian pendapatan yang terselubung di balik angka-angka GNP datang dari mereka yang diidentikan sebagai pencetus indikator pembangunan nonekonomi. Meskipun corak ekonomi masih jelas dalam konsep mereka, namun ada perubahan fundamental di dalam cara memberikan makna pertumbuhan ekonomi itu sendiri jika dibanding dengan ide pendukung indikator pembangunan ekonomi klasik. Tokoh utama pendukung indikator nonekonomi ini, Dudley Seers, sebagaimana dikutip Moeljarto (1987), menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu Negara, yaitu apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan; apa yang tengah terjadi dengan pengangguran; dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. Apabila jawaban atas ketiga hal tersebut adalah “penurunan secara substansial” maka tidak diragukan lagi bahwa nrgara tersebut baru mengalami periode pembangunan.

Sosiolog Mochtar Naim (2011) mengabarkan bahwa yang ditonjolkan selama ini hanyalah “apa dan bagaimana serta dengan hasil capaian berapa, secara makro, lalu dibagi dengan jumlah penduduk”, tetapi tak pernah “oleh siapa dan untuk siapa, menurut jalur pelapisan sosial”. Padahal struktur masyarakat kita sangat berlapis dan bertingkat, bahkan cenderung dualistik dan dikotomik. Celaknya, pelapisan dan dualisme ataupun dikotomi sosial itu, seperti pada zaman kolonial dulu, cenderung etnosentrik dan etno-bias pula sifatnya. Artinya, kelompok terkecil masyarakat menurut jalur etnik itu, yang umumnya adalah nonpribumi, menguasai bagian terbesar kekayaan nasional. Sementara kelompok terbesar dari masyarakat pribumi yang merupakan

pewaris sah dari republik ini mendapatkan bagian dan porsi terkecil. Akibatnya, cita-cita Pasal 34 UUD 1945, “pembangunan itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hanyalah isapan jempol belaka.

Cobalah lihat atau cermati, siapa yang menggarap dan menguasai bumi, air, lautan dan langit Indonesia selama ini? Pemilik dan pewaris sah yang 95 persen penduduk asli pribumi atau 5 persen nonpribumi dan kapitalis multinasional lainnya? Jawaban yang jujur dan apa adanya itulah yang menjelaskan kepada kita bagaimana dan betapa keadaan sesungguhnya dari negara dan masyarakat kita saat ini.

III. KEMISKINAN

Mencoba menghitung jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan mudah. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Kecuk Suharyanto, 2011). Hanya satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas sehingga bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar? Apalagi, tidak semua hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Dari definisi itu terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah multidemensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai. Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang

diterapkan di banyak Negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (Suhariyanto, 2011).

Dalam terapannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran atau pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Perhitungan penduduk miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus, sehingga hasilnya sebetulnya hanyalah estimasi. Data yang dihasilkan biasa disebut data kemiskinan makro. Di Indonesia, sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial ekonomi Nasional. BPS menyajikan data kemiskinan makro ini sejak tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin bisa diikuti dalam waktu ke waktu.

Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data kemiskinan pada Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin naik dari 35,1 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada Maret 2006 karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) (Kecuk Suharyanto, 2011). Adapun data kemiskinan makro yang terakhir dikeluarkan BPS adalah posisi Maret 2010 ketika jumlah penduduk miskin 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen total penduduk Indonesia. Data ini hanya menunjukkan estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin yang berguna

untuk perencanaan serta evaluasi program kemiskinan dengan target geografis.

Akan tetapi, data itu tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Politik ekonomi untuk kesejahteraan rakyat mendapat ujian yang cukup serius pada saat ini ketika pertumbuhan ekonomi dinilai berhasil, tetapi kesejahteraan untuk rakyat bawah dipertanyakan. Ada kontradiksi didalam wacana kinerja dan kebijakan ekonomi, yakni klaim kinerja ekonomi yang “kinclong” oleh pemerintah pada satu sisi, dan masalah kemiskinan serta sektor informal yang masih luas dan buruk pada sisi lain (Rachbini, 2010). Keadaan ini berasosiasi dengan kemiskinan yang meluas dan tidak bisa diukur dengan satu kriteria garis kemiskinan.

IV. PENUTUP

Kesejahteraan atau keadaan tidak miskin merupakan keinginan lahiriah setiap orang. Keadaan semacam itu, akan tetapi, barulah sekadar memenuhi kepuasan hidup manusia sebagai makhluk individu. Padahal, di samping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakatnya. Dalam kapasitas sebagai makhluk sosial ini (Dumairy, 1997), manusia membutuhkan “kebersamaan” dengan manusia-manusia lain di dalam masyarakatnya. Kesetaraan kemakmuran dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok, merupakan salah satu

sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran. Pengurangan kesenjangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan.

Ditilik berdasarkan berbagai indikator, terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dengan orang-orang kota. Bahkan untuk beberapa variable atau indikator, sekalipun tingkat kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf lebih besar di kota daripada di desa. Keadaan bayi dan anak-anak balita di kota lebih baik daripada teman-teman mereka yang tinggal di desa. Kelayakan rumah orang-orang kota jauh lebih baik daripada rumah orang-orang desa. Indeks mutu hidup di kota juga lebih baik daripada di desa. Semua ini cukup membuktikan masih memprihatinkannya kesenjangan sosial anatar masyarakat desa dan masyarakat kota. Kesenjangan sosial pun bukan hanya berlangsung antardaerah, tetapi juga antar wilayah.

Pengurangan kemiskinan memang perlu. Kemiskinan, sampai kadar tertentu, memang bertalian dengan ketimpangan. Akan tetapi pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan. Sebagai suatu bangsa, kita bukan hanya ingin hidup lebih makmur (tidak miskin), tetapi juga mendambakan kebersamaan dalam kemakmuran, kesejahteraan bersama yang relatif setara, tanpa perbedaan mencolok satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2009. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Didik J Rachbini, 2010. *Kemiskinan dan Politik Ekonomi*, Media Indonesia, 12/01/2010.
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Kecuk Suhariyanto, 2011. "Jumlah Si Miskin," *Kompas*.
- Kurnia JR, 2011. "Bangsa Paling Merepotkan," *Kompas*.
- Mochtar Naim, 2011. "Kita Belum Merdeka," *Kompas*.
- Moeljarto T, 1987, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*, Yogyakarta; Tiara Wacana.
- Musa Asy'arie, 2011, "Kebangkitan Nasional, Perspektif Kebudayaan," *Kompas*.
- Oman Sukmana, 2005. *Sosiologi dan Politik Ekonomi*, Malang, UMM Press.
- Saifur Rohman, 2011, "Memaknai Ekonomi Tiwul," *Kompas*.
- Sayidiman Suryohadiprojo, 2011. "Kesenjangan adalah Kerawanan," *Kompas*.

Biodata Penulis

Mochamad Syawie. Alumnus Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakri, Jakarta. Saat ini sebagai Peneliti Madya di Puslitbang kessos.